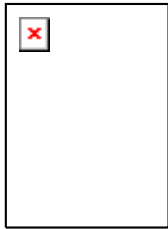




**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
2024**



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan K. H. Abdul Halim No. 69 ☎ (0233) 281605 Fax. (0233) 282223
Majalengka 45417

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 000.7.2.6/18/Sekret

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Permukiman, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026;
9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 sebagai acuan dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan,
Kabupaten Majalengka



SIDHARTA, AP., MP

Pembina Utama Muda
NIP. 19760923 199603 1 006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas petunjuk dan karunia-Nya, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka telah menyusun **“PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024”**.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat kebijakan, program dan indikasi kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan acuan, pedoman dan dasar pelaksanaan kerja (program, kegiatan dan sub kegiatan) pada Tahun 2024 bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan pergeseran dan perubahan anggaran.

Sesuai dengan kedudukannya dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik Pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Majalengka, 19 Agustus 2024

KEPALA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA



SIDHARTA, AP., MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760923 199603 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN LALU	
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun Lalu	4
2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	4
2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	4
2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	5
2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan	6
2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah	8

2.1.6.	Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor tersebut	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PKPP	14
2.3	Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	16
2.4	Review Terhadap Rencana Awal RKPD	18
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
3.3	Program Kegiatan	27
3.3.1	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	27
3.3.2.	Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	28
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	30
BAB V	PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagai bahan sinkronisasi dan koordinasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten majalengka Tahun 2024, sebagaimana proses dan tahapan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan suatu rencana Akhir program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan perubahan RKPD Tahun 2024.

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 serta untuk penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja yang akan disusun dilakukan dengan langkah - langkah :

1. Menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) yang memiliki keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian/ Lembaga dan Renja Provinsi.
2. Menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan yang selanjutnya dikembangkan melalui Musrenbang OPD untuk mendapatkan susunan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Hasil pembahasan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 tingkat Kabupaten, selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja.

Selanjutnya berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dimana secara definitif ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Majalengka nomor 11 tahun 2024 dijadikan dasar untuk proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – undang no 23 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Majalengka No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
12. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 – 2026;
13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Majalengka

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan operasional tahunan.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan sinkronisasi dan koordinasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten majalengka Tahun 2024.
2. Mengevaluasi kinerja pembangunan Tahun 2023 dan menganalisis prospek pembangunan Tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi pembangunan daerah.
3. Mengarahkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
4. Menyusun prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.
5. Mewujudkan sinergitas program dan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari urusan perumahan dan kawasan permukiman, dan sub urusan pertanahan.

1.4. SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

Sistematika Penyajian Laporan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan Akhir RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjabarkan kerangka dasar pelaksanaan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Perangkat Daerah Serta menjabarkan rencana kerangka pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka, khususnya tahun anggaran 2024 sesuai yang tercantum pada Renstra 2024-2026 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan target, tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Majalengka tahun 2024-2026.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023 sampai dengan akhir Tahun atau Triwulan IV dan perkiraan capaian tahun berjalan pada tahun 2024. Dinas PKPP Kabupaten Majalengka didukung dengan anggaran yang bersumber dari dana APBD/DAU sebesar Rp. 53.317.388.059 dengan realisasi sampai akhir triwulan IV sebesar Rp. 48.750.351.875 dalam persentase (91,49%).

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja hasil/Keluaran Yang Di Rencanakan

Realisasi kinerja program/kegiatan di dalam Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai acuan dari hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan/atau realisasi APBD dimana terdapat 1 program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja pada tahun 2023 sebagai tahun berjalan.

Dimana satu program tersebut tidak memenuhi target yaitu:

Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yaitu dengan indikator kinerja presentase kawasan kumuh yang tertata dengan target 20% dan realisasi 8,51% sehingga menghasilkan capaian kinerja 42,55% dimana hasil capaian tersebut kurang dari 100% sehingga program tersebut tidak memenuhi target.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Realisasi kinerja program/kegiatan di dalam Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai acuan dari hasil laporan kinerja tahunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan/atau realisasi APBD dimana terdapat dua program yang telah terpenuhi target kinerjanya dengan detail sebagai berikut :

1. Program/kegiatan yang memenuhi target yaitu dengan indikator kinerja Persentase PSU Perumahan yang dimanfaatkan dimana dengan realisasi 2

lokasi tetapi target kinerja nya 2 lokasi sehingga menghasilkan capaian kinerja 100%.

2. Program/kegiatan yang memenuhi target yaitu dengan indikator kinerja Persentase data kawasan permukiman yang dimanfaatkan dimana dengan realisasi 100% atau 3 Dokumen dari target kinerja nya 100% atau 3 Dokumen sehingga menghasilkan capaian kinerja 100% dari capaian kinerja tersebut 100% dengan capaian tersebut memenuhi target

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Dalam Dinas Perumahan Kawasan permukiman pada tahun 2023 sebagai tahun berjalan dalam realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan terdapat 5 program :

1. Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yaitu dengan indikator kinerja Persentase kebutuhan infrastruktur air minum yang terpenuhi dimana target kinerja nya 80,65% dengan realisasi 81,14% sehingga menghasilkan capaian kinerja 100,61% dimana hasil capaian ini lebih dari 100%, dimana hasil ini termasuk program/kegiatan yang memenuhi target kinerja.
2. Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yaitu dengan indikator kinerja Persentase permohonan pengolahan air limbah yang terlayani sesuai standar dimana target kinerja nya 68,66% dengan realisasi 69,79% sehingga menghasilkan capaian kinerja 101,65% dimana hasil capaian ini lebih dari 100%, dimana hasil ini termasuk program/kegiatan yang memenuhi target kinerja.
3. Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yaitu dengan indikator kinerja Persentase peningkatan jaringan drainase dimana target kinerja nya 68,66% dengan realisasi 69,79% sehingga menghasilkan capaian kinerja 101,65% dimana hasil capaian ini lebih dari 100%, dimana hasil ini termasuk program/kegiatan yang memenuhi target kinerja
4. Program/kegiatan yang memenuhi target kinerja selanjutnya yaitu dengan indikator kinerja Persentase peningkatan jaringan jalan lingkungan dengan capaian kinerja 102,25%, capaian kinerja ini melebihi dari 100%, sehingga termasuk kedalam program/kegiatan yang melebihi target dengan target 88,79% dengan realisasi 90,79% hal ini menjadikan program kegiatan dengan indikator kinerja Persentase peningkatan jaringan jalan lingkungan, realisasi nya melebihi target.
5. Program/kegiatan yang memenuhi target yaitu dengan indikator kinerja Persentase permohonan pembebasan lahan yang terlayani sesuai standar dimana dengan realisasi 4 lokasi dari target kinerja nya 3 lokasi sehingga

menghasilkan capaian kinerja 133,33% dari capaian kinerja tersebut melebihi dari 100% dengan capaian tersebut memenuhi target.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- Faktor yang membuat target presentase kawasan kumuh yang tertata mengalami penurunan presentase capaian sebesar 7,89%, yang mana pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 1.229 unit dan pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 638 unit dikarenakan semakin berkurangnya anggaran Rutilahu yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan juga terbatasnya anggaran dari provinsi yang menyediakan anggaran Bantuan Sosial RUTILAHU Provinsi yang mana di tahun 2023 hanya turun 500 unit dari target 1000 unit rumah, selain itu pada tahun 2023 pula persyaratan untuk RUTILAHU Sumber Dana DAK diwajibkan memiliki Perda Kumuh dan Dana Sharing Kabupaten sehingga pada tahun 2023 tidak lagi mendapatkan RUTILAHU Sumber Dana DAK.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator dari program Sistem Penyediaan Air Minum salah satu program dari bidang permukiman di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu meningkatnya lokasi penerima program/kegiatan dan SR dari program/kegiatan DAK lebih banyak diatas target.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program penyediaan air limbah tersebut pada bidang permukiman dimana program ini mempunyai faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator yaitu hampir sama dengan dengan faktor pada program SPAM yaitu di pengaruhi pada banyaknya lokasi penerimaan program/kegiatan dan SR dari program/kegiatan DAK,
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada program pembangunan jalan lingkungan yaitu banyak nya permohonan dari setiap desa yang ada di Kabupaten Majalengka untuk diperbaiki nya jalan di desa tersebut, sehingga hal ini menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan karena antusiasme masyarakat terhadap program ini, selain itu juga yang menjadi faktor keberhasilan dari program ini yaitu banyak nya jalan yang perlu di perbaiki dikarenakan jalan desanya banyak yang berlubang sebab serapan air hujan dan suhu udara yang tidak menentu sehingga mengakibatkan jalan menjadi retak dan pecah ditambah banyak nya kendaraan yang melintas sehingga mengakibatkan jalan berlubang.

- Faktor keberhasilan didalam Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam indikator kinerja presentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai perundang undangan lingkup Dinas PKPP yaitu selalu mengutamakan tepat waktu nya pengajuan Gaji dan tunjangan untuk para pegawai sehingga menjadikan pegawai prioritas kesejahteraan nya bukan hanya pengabdian pegawai kepada pihak dinas atau pemerintahan kabupaten Majalengka melainkan juga pihak dinas mengutamakan kesejahteraan pegawai dengan melalui tepat waktu nya pengajian terhadap pegawai, selain itu juga, di dalam Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, mengeluarkan kebijakan dimana pegawai bisa izin Ketika ada kebutuhan yang mendesak untuk tidak ke kantor dengan alasan yang kuat, dengan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak dinas Ketika akan izin mempunyai kebutuhan tertentu di luar kantor, sehingga hal ini lah menjadi cerminan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman selalu mengutamakan kebutuhan dan juga kesejahteraan pegawai.
- Faktor penyebab keberhasilan di lingkungan Dinas PKPP dari indikator kinerja presentase sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin pada perangkat daerah lingkup Dinas PKPP yaitu ada nya pegawai khusus untuk pemeliharaan rutin terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di likup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, selain itu juga terkordinirnya data sarana prasarana yang ada di lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga penanganan dan pemeliharaan nya teratur dan rutin, selain itu juga perawatan sarana dan prasarana dilakukan secara konsisten dan juga bergilir sehingga di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki sarana dan prasaran yang pemeliharaan nya secara rutin dan teratur.
- Faktor yang menyebabkan keberhasilan di dalam lingkup Dinas PKPP terkait indikator tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah yaitu di dalam dinas perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan mempunyai operasional perangkat dengan kebijakan dan koordinasi yang baik sehingga menghasilkan pemenuhan operasional yang meningkat.
- Faktor penyebab keberhasilan di lingkungan Dinas PKPP dari indikator kinerja presentase sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin pada perangkat daerah lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu ada nya pegawai khusus untuk pemeliharaan rutin terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di likup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, selain itu juga terkordinirnya data sarana prasarana yang ada di lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga penanganan dan pemeliharaan nya teratur dan rutin,

selain itu juga perawatan sarana dan prasarana dilakukan secara konsisten dan juga bergilir sehingga di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki sarana dan prasaran yang pemeliharaan nya secara rutin dan teratur.

- Faktor yang menyebabkan keberhasilan terkait indikator tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan di dalam lingkup dinas, yaitu adanya koordinasi dari bagian pelaporan kinerja dan bagian keuangan sehingga data yang dihasilkan sinkron, dan juga terjalin komunikasi dengan baik antar bagian karena komunikasi dan juga koordinasi yang baik ini lah yang menjadikan keberhasilan tingkat kesesuaian antara pelaporan kinerja dan keuangan didalam Dinas PKPP.
- Faktor yang menyebabkan keberhasilan di dalam Dinas PKPP terkait indikator tingkat kesesuaian Perencanaan daerah dan perencanaan di dalam lingkup dinas Perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan, yaitu adanya koordinasi dari bagian Perencanaan daerah dan perencanaan Dinas PKPP, sehingga data yang dihasilkan sinkron, dan juga terjalin komunikasi dengan baik antar bagian karena komunikasi dan juga koordinasi yang baik ini lah yang menjadikan keberhasilan tingkat kesesuaian antara Perencanaan daerah dan perencanaan.
- Faktor yang menyebabkan keberhasilan di dinas perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan terkait indikator presentase peningkatan program Dinas PKPP yaitu Developer memberikan apresiasi untuk serah terima PSU perumahannya, dan juga ketersediaan anggaran belanja untuk kegiatan pemeliharaan jalan perumahan yang sudah menyerahkan PSU nya kepada pemerintah daerah.
- Faktor yang menyebabkan keberhasilan di dalam lingkup Dinas PKPP terkait indikator Jumlah Tanah untuk pembangunan fasilitas umum yaitu terlaksananya pembebasan lahan untuk kepentingan umum dari target 3 lokasi terealisasi 4 lokasi, hal ini di dukung oleh anggaran dan kondusifitas di lapangan dalam penentuan harga yang disusun dan diajukan oleh appraisal.

2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Secara keseluruhan capaian target kinerja Program dan Kegiatan Dinas PKPP Kabupaten Majalengka berimplikasi positif terhadap target capaian Program dan Kegiatan yang telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024-2026.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor Faktor Penyebab Tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah memperkuat Program dan Kegiatan untuk mencapai target, sasaran dan tujuan khususnya pada pendanaan anggaran

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd
KABUPATEN MAJALENGKA
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
										I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
1	1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
2	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		18.470,00	172.512.229.998	2.000,00	59.897.196.750	500,00	33.774.224.000	74,00	20.899.000	100,00	32.448.000	123,00	4.878.414.850	149,00	27.386.525.150	446,00	32.318.287.000	89,88	97	2.446,00	92.215.483.750	46,81	52
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		650,00	103.089.259.500	400,00	24.854.180.750	100,00	16.622.468.000	15,00	5.246.000	25,00	8.112.000	23,00	2.386.581.750	30,00	12.863.551.250	93,00	15.263.491.000	93,00	92	493,00	40.117.671.750	75,85	39
4	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	TERLAYANINYA SARANA AIR BERSIH	650,00	103.089.259.500	400,00	24.854.180.750	100,00	16.622.468.000	15,00	5.246.000	25,00	8.112.000	23,00	2.386.581.750	30,00	12.863.551.250	93,00	15.263.491.000	93,00	92	493,00	40.117.671.750	75,85	39
5	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlayannya sarana air bersih	650,00	103.089.259.500	400,00	24.854.180.750	100,00	16.622.468.000	15,00	5.246.000	25,00	8.112.000	23,00	2.386.581.750	30,00	12.863.551.250	93,00	15.263.491.000	93,00	92	493,00	40.117.671.750	75,85	39
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				93,00	92				
6	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	TERLAYANINYA AIR LIMBAH	1.520,00	19.024.302.498	800,00	8.817.744.000	200,00	1.383.100.000	29,00	5.246.000	31,00	8.112.000	46,00	346.757.600	67,00	1.018.438.400	173,00	1.378.554.000	86,50	99	973,00	10.196.298.000	64,29	47
7	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	TERLAYANINYA AIR LIMBAH	1.520,00	19.024.302.498	800,00	8.817.744.000	200,00	1.383.100.000	29,00	5.246.000	31,00	8.112.000	46,00	346.757.600	67,00	1.018.438.400	173,00	1.378.554.000	86,50	99	973,00	10.196.298.000	64,29	47
8	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkata n/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Terlayannya air limbah	820,00	7.458.844.000	400,00	792.984.000	100,00	242.560.000	20,00	5.246.000	23,00	8.112.000	23,00	65.622.600	32,00	159.203.400	98,00	238.184.000	98,00	98	498,00	1.031.168.000	60,73	14
9	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyedi aan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlayannya air limbah	700,00	11.565.458.498	400,00	8.024.760.000	100,00	1.140.540.000	9,00	0	8,00	0	23,00	281.135.000	35,00	859.235.000	75,00	1.140.370.000	75,00	100	475,00	9.165.130.000	67,86	79
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				86,50	99				
10	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	TERLAYANINYA SARANA DRAINASE	1.100,00	7.783.100.000	400,00	1.589.964.000	100,00	550.000.000	5,00	0	19,00	0	27,00	44.599.500	31,00	501.360.500	82,00	545.960.000	82,00	99	482,00	2.135.924.000	43,82	27
11	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	TERLAYANINYA SARANA DRAINASE	1.100,00	7.783.100.000	400,00	1.589.964.000	100,00	550.000.000	5,00	0	19,00	0	27,00	44.599.500	31,00	501.360.500	82,00	545.960.000	82,00	99	482,00	2.135.924.000	43,82	27
12	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terlayannya sarana drainase	1.100,00	7.783.100.000	400,00	1.589.964.000	100,00	550.000.000	5,00	0	19,00	0	27,00	44.599.500	31,00	501.360.500	82,00	545.960.000	82,00	99	482,00	2.135.924.000	43,82	27
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				82,00	99				
13	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		15.200,00	42.615.568.000	400,00	24.635.308.000	100,00	15.218.656.000	25,00	10.407.000	25,00	16.224.000	27,00	2.100.476.000	21,00	13.003.175.000	98,00	15.130.282.000	98,00	99	498,00	39.765.590.000	3,28	93
14	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	TEREHABNYA JALAN LINGKUNGAN	15.200,00	42.615.568.000	400,00	24.635.308.000	100,00	15.218.656.000	25,00	10.407.000	25,00	16.224.000	27,00	2.100.476.000	21,00	13.003.175.000	98,00	15.130.282.000	98,00	99	498,00	39.765.590.000	3,28	93

No	Kode	Urusan/ BidangUrusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahunberjalan (Tahun 2023)yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat Daerah s/d tahun2023 (Akhir TahunPelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
15	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terehabnya jalan lingkungan	15.200,00	42.615.568.000	400,00	24.635.308.000	100,00	15.218.656.000	25,00	10.407.000	25,00	16.224.000	27,00	2.100.476.000	21,00	13.003.175.000	98,00	15.130.282.000	98,00	99	498,00	39.765.590.000	3,28	93
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				98,00	99				
16	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		17.308,00	85.353.960.786	8.691,00	34.889.507.242	2.500,00	9.809.385.345	356,00	1.055.761.541	517,00	2.180.977.361	451,00	3.425.810.315	766,00	2.254.289.681	2.090,00	8.916.838.898	90,99	85	10.781,00	43.806.346.140	740,61	52
17	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.146,00	52.317.533.886	7.788,00	26.469.212.942	2.100,00	6.619.827.545	276,00	1.024.540.541	431,00	1.978.980.561	367,00	1.360.879.115	640,00	1.696.651.946	1.714,00	5.961.052.163	83,96	85	9.502,00	32.430.265.105	64,04	55
18	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TERPENUHINYA DOKUMEN PERENCANAAN	5.760,00	524.511.700	2.800,00	202.755.600	700,00	79.998.300	85,00	14.741.200	125,00	23.536.900	101,00	11.519.700	202,00	14.576.400	513,00	64.374.200	73,29	79	3.313,00	267.129.800	57,52	54
19	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan	840,00	48.199.100	400,00	16.599.200	100,00	14.999.900	19,00	5.105.200	21,00	9.863.700	13,00	0	29,00	0	82,00	14.968.900	82,00	100	482,00	31.568.100	57,38	65
20	1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terpenuhinya dokumen perencanaan	810,00	28.143.800	400,00	8.072.000	100,00	11.999.800	9,00	0	15,00	0	13,00	0	29,00	5.249.800	66,00	5.249.800	66,00	44	466,00	13.321.800	57,53	47
21	1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terpenuhinya dokumen perencanaan	820,00	22.143.900	400,00	8.072.000	100,00	5.999.900	9,00	0	11,00	0	21,00	5.534.900	27,00	0	68,00	5.534.900	68,00	92	468,00	13.606.900	57,07	61
22	1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terpenuhinya dokumen perencanaan	820,00	56.719.800	400,00	23.860.000	100,00	5.999.600	17,00	3.801.000	16,00	2.198.600	13,00	0	29,00	0	75,00	5.999.600	75,00	100	475,00	29.859.600	57,93	53
23	1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terpenuhinya dokumen perencanaan	820,00	59.719.800	400,00	26.860.000	100,00	5.999.600	5,00	0	11,00	0	17,00	0	27,00	2.824.600	60,00	2.824.600	60,00	47	460,00	29.684.600	56,10	50
24	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya dokumen perencanaan	810,00	115.999.600	400,00	48.000.000	100,00	19.999.600	11,00	3.520.000	21,00	6.399.600	11,00	3.804.800	32,00	3.782.100	75,00	17.506.500	75,00	88	475,00	65.506.500	58,64	56
25	1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya dokumen perencanaan	840,00	193.585.700	400,00	71.292.400	100,00	14.999.900	15,00	2.315.000	30,00	5.075.000	13,00	2.180.000	29,00	2.719.900	87,00	12.289.900	87,00	82	487,00	83.582.300	57,98	43
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				73,29	79				
26	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERPENUHINYA GAJI PEGAWAI	642,00	36.915.415.950	400,00	19.313.743.165	100,00	4.544.476.789	15,00	871.087.384	25,00	1.528.397.514	23,00	1.000.271.390	31,00	970.414.320	94,00	4.370.170.608	94,00	96	494,00	23.683.913.773	76,95	64
27	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji pegawai	642,00	36.915.415.950	400,00	19.313.743.165	100,00	4.544.476.789	15,00	871.087.384	25,00	1.528.397.514	23,00	1.000.271.390	31,00	970.414.320	94,00	4.370.170.608	94,00	96	494,00	23.683.913.773	76,95	64
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				94,00	96				
28	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TERSEDIAANYA PAKAIAN DAN ATRIBUT DINAS	446,00	270.206.000	103,00	64.489.000	100,00	32.000.000	5,00	0	27,00	32.000.000	13,00	0	29,00	0	74,00	32.000.000	74,00	100	177,00	96.489.000	39,69	36
29	1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas perangkat daerah	446,00	270.206.000	103,00	64.489.000	100,00	32.000.000	5,00	0	27,00	32.000.000	13,00	0	29,00	0	74,00	32.000.000	74,00	100	177,00	96.489.000	39,69	36
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				74,00	100				
30	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TERPENUHINYA OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH	4.816,00	8.721.838.432	2.400,00	3.752.326.132	600,00	1.127.093.100	61,00	62.405.000	126,00	239.235.840	118,00	233.242.834	186,00	358.439.005	491,00	893.322.679	81,83	88	2.891,00	4.645.648.811	60,03	57
31	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	801,00	238.555.000	400,00	137.080.000	100,00	31.535.000	5,00	0	19,00	12.151.000	11,00	5.834.000	31,00	13.350.000	66,00	31.335.000	66,00	99	466,00	168.415.000	58,18	71
32	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	801,00	2.433.261.600	400,00	1.376.588.000	100,00	237.662.000	10,00	34.495.000	11,00	6.582.000	13,00	68.999.620	33,00	124.915.000	67,00	234.991.620	67,00	99	467,00	1.611.579.620	58,30	66
33	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	801,00	2.271.620.000	400,00	537.820.000	100,00	115.760.000	13,00	4.140.000	27,00	73.475.000	25,00	34.645.000	29,00	0	94,00	112.260.000	94,00	97	494,00	650.080.000	61,67	29
34	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	801,00	523.202.100	400,00	258.830.400	100,00	59.428.900	11,00	4.011.000	19,00	12.127.000	23,00	14.985.800	31,00	16.306.500	84,00	47.430.300	84,00	80	484,00	306.260.700	60,42	59

No	Kode	Urusan/ Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahunberjalan (Tahun 2023)yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat Daerah sid tahun2023 (Akhir TahunPelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
35	1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	811,00	1.010.848.000	400,00	429.920.000	100,00	162.017.000	11,00	4.212.000	19,00	20.648.000	23,00	21.456.000	33,00	107.411.000	86,00	153.727.000	86,00	95	486,00	583.647.000	59,93	58
36	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	801,00	2.244.351.732	400,00	1.012.087.732	100,00	520.690.200	11,00	15.547.000	31,00	114.252.840	23,00	87.322.414	29,00	96.456.505	94,00	313.578.759	94,00	60	494,00	1.325.666.491	61,67	59
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				81,83	88				
37	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERPENUHINYA OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH	1.773,00	4.672.482.604	1.028,00	2.583.504.245	300,00	573.607.356	45,00	74.393.357	67,00	113.755.307	57,00	101.118.191	95,00	150.927.626	264,00	440.194.481	88,00	83	1.292,00	3.023.698.726	72,29	62
38	1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	601,00	175.870.000	400,00	82.500.000	100,00	34.880.000	7,00	0	19,00	7.500.000	13,00	5.000.000	33,00	22.000.000	72,00	34.500.000	72,00	99	472,00	117.000.000	78,54	67
39	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	524,00	1.275.883.116	229,00	461.476.909	100,00	269.279.356	19,00	31.939.357	21,00	32.481.857	23,00	35.278.191	31,00	39.030.376	94,00	138.729.781	94,00	52	323,00	600.206.690	61,64	47
40	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	648,00	3.220.729.488	399,00	2.039.527.336	100,00	269.448.000	19,00	42.454.000	27,00	73.773.450	21,00	60.840.000	31,00	89.897.250	98,00	266.964.700	98,00	99	497,00	2.306.492.036	76,70	72
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				88,00	83				
41	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERPENUHINYA OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH	1.709,00	1.213.079.200	1.057,00	582.394.800	300,00	262.652.000	65,00	1.913.600	61,00	42.055.000	55,00	14.727.000	97,00	102.294.595	278,00	160.990.195	92,67	62	1.335,00	713.384.995	77,78	59
42	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	522,00	377.680.200	274,00	118.887.300	100,00	82.652.000	19,00	1.913.600	23,00	13.250.000	17,00	5.200.000	32,00	23.938.300	91,00	44.301.900	91,00	54	365,00	163.189.200	69,92	43
43	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	586,00	482.756.000	386,00	228.163.000	100,00	85.000.000	23,00	0	11,00	0	19,00	0	35,00	74.377.295	88,00	74.377.295	88,00	88	474,00	302.540.295	80,89	63
44	1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya operasional perangkat daerah	601,00	352.643.000	397,00	205.344.500	100,00	95.000.000	23,00	0	27,00	28.805.000	19,00	9.527.000	30,00	3.979.000	99,00	42.311.000	99,00	45	496,00	247.655.500	82,53	70
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				92,67	62				
45	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		3,00	600.000.000	0,00	0	100,00	467.320.000	23,00	0	11,00	0	17,00	0	33,00	298.176.050	84,00	298.176.050	84,00	64	84,00	298.176.050	2.800,00	50
46	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		3,00	600.000.000	0,00	0	100,00	467.320.000	23,00	0	11,00	0	17,00	0	33,00	298.176.050	84,00	298.176.050	84,00	64	84,00	298.176.050	2.800,00	50
47	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersedianya dokumen perencanaan	3,00	600.000.000	0,00	0	100,00	467.320.000	23,00	0	11,00	0	17,00	0	33,00	298.176.050	84,00	298.176.050	84,00	64	84,00	298.176.050	2.800,00	50
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				84,00	64				
48	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	TERLAYANINYA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	556,00	28.719.864.000	103,00	6.063.170.000	100,00	2.137.198.000	23,00	20.814.000	21,00	54.548.000	23,00	1.819.626.000	33,00	207.147.885	100,00	2.102.135.885	100,00	98	203,00	8.165.305.885	36,51	28
49	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		556,00	28.719.864.000	103,00	6.063.170.000	100,00	2.137.198.000	23,00	20.814.000	21,00	54.548.000	23,00	1.819.626.000	33,00	207.147.885	100,00	2.102.135.885	100,00	98	203,00	8.165.305.885	36,51	28
50	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlayannya rumah tidak layak huni	556,00	28.719.864.000	103,00	6.063.170.000	100,00	2.137.198.000	23,00	20.814.000	21,00	54.548.000	23,00	1.819.626.000	33,00	207.147.885	100,00	2.102.135.885	100,00	98	203,00	8.165.305.885	36,51	28
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																				100,00	98				

No	Kode	Urusan/ BidangUrusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahunberjalan (Tahun 2023)yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RenstraPerangkat Daerah s/d tahun2023 (Akhir TahunPelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6+12		15 = 14/5*100	
51	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	TERLAYANINYA SARANA PRASARANA UTILITAS	1.603,00	3.716.562.900	800,00	2.357.124.300	200,00	585.039.800	34,00	10.407.000	54,00	147.448.800	44,00	245.305.200	60,00	152.313.800	192,00	555.474.800	96,00	93	992,00	2.912.599.100	61,88	77
52	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		1.603,00	3.716.562.900	800,00	2.357.124.300	200,00	585.039.800	34,00	10.407.000	54,00	147.448.800	44,00	245.305.200	60,00	152.313.800	192,00	555.474.800	96,00	93	992,00	2.912.599.100	61,88	77
53	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terlayannya sarana dan prasarana utilitas	801,00	1.264.715.300	400,00	759.092.300	100,00	153.069.800	17,00	0	33,00	131.224.800	21,00	0	27,00	6.000.000	98,00	137.224.800	98,00	90	498,00	896.317.100	62,17	71
54	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlayannya sarana dan prasarana utilitas	802,00	2.451.847.600	400,00	1.598.032.000	100,00	431.970.000	17,00	10.407.000	21,00	16.224.000	23,00	245.305.200	33,00	146.313.800	94,00	418.250.000	94,00	97	494,00	2.016.282.000	61,60	82
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			96,00	93					
55	2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
56	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		613,00	31.670.620.084	400,00	16.374.991.623	100,00	9.733.879.714	11,00	10.492.000	19,00	28.834.400	21,00	4.185.148.690	31,00	3.320.850.887	82,00	7.545.325.977	82,00	78	482,00	23.920.317.600	78,63	76
57	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	TERLAYANINYA GANTI RUGI TANAH	613,00	31.670.620.084	400,00	16.374.991.623	100,00	9.733.879.714	11,00	10.492.000	19,00	28.834.400	21,00	4.185.148.690	31,00	3.320.850.887	82,00	7.545.325.977	82,00	78	482,00	23.920.317.600	78,63	76
58	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		613,00	31.670.620.084	400,00	16.374.991.623	100,00	9.733.879.714	11,00	10.492.000	19,00	28.834.400	21,00	4.185.148.690	31,00	3.320.850.887	82,00	7.545.325.977	82,00	78	482,00	23.920.317.600	78,63	76
59	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlayannya ganti rugi tanah	613,00	31.670.620.084	400,00	16.374.991.623	100,00	9.733.879.714	11,00	10.492.000	19,00	28.834.400	21,00	4.185.148.690	31,00	3.320.850.887	82,00	7.545.325.977	82,00	78	482,00	23.920.317.600	78,63	76
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																			82,00	78					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						11.091,00	111.161.695.615	3.100,00	53.317.489.059	441,00	1.087.152.541	636,00	2.242.259.761	595,00	12.489.373.855	946,00	32.961.665.718	2.618,00	48.780.451.875	86,22	84	13.709,00	159.942.147.490	236,17	64

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : untuk pekerjaan khususnya infrastruktur yang bersumber dana dari dau telah selesai dilaksanakan adapun capaian baru 53% dikarenakan kas ada pergeseran perubahan anggaran yang mengakibatkan pencairan dana menunggu penetapan apbdp

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : sumber dana yang bersumber dari DAK baru terealisasi di tri iii dimana pelaksanaan pekerjaan baru dilaksanakan di tri iii dimana penyerapan dana nya belum semuanya terealisasi berikut penbgadaan tanah yang masih belum trerrealisasi

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : setelah penetapan apbdp dapat segera trerrealisasi dan memonitoring pengadaan tanah yang melibatkan berbagai pihak agar bisa di monitoring

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPd Berikutnya : agar menjadi catatan dimana berbagai faktor penghambat dapat bertahap mulai teratasi

Majalengka, 11 Januari 2024
Dievaluasi,
Kepala Badan Perencanaan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Majalengka, 2024
Dievaluasi,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



SIMBARTA, AP., M.P
NIP. 19760923 199603 1 006

Drs. H. YAYAN SUMANTRI, M.Si.
NIP. 19670724 198603 1 002

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dikaji melalui indikator - indikator antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Majalengka

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase kawasan kumuh yang tertata	SPM Perumahan Rakyat	Persentase peningkatan kawasan kumuh yang terbangun	20	20	33,33	33,33	16,39	8,5	33,33	33,33	
2	Persentase kebutuhan infrastruktur air minum yang terpenuhi	SPM Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana air minum yang terbangun sesuai standar	80,41	80,65	80,75	80,80	80,62	81,14	80,75	80,80	
3	Persentase permohonan pengolahan air limbah yang terlayani sesuai standar	SPM Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana air limbah yang terbangun sesuai standar	69,75	68,66	68,75	68,80	69,62	69,79	68,75	68,80	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Perubahan aturan tentang Pemerintahan Daerah, dari Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan adanya perubahan pembagian urusan dalam sistem pemerintahan daerah. Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar, Bidang Pertanahan memiliki urusan tersendiri, terpisah dari urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Merespon perubahan aturan tentang Pemerintahan Daerah tersebut, menjelang akhir tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Majalengka menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selama ini menangani urusan Pekerjaan Umum sub urusan Sumber Daya Air dan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, berubah nomenklatur menjadi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanannya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak lepas dari permasalahan – permasalahan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang bersifat dinamis, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pembangunan di semua aspek, beberapa di antaranya telah mencapai hasil yang diharapkan. Namun demikian, terdapat permasalahan, yaitu bahwa hasil evaluasi pembangunan masih menunjukkan kesenjangan antara target dan hasil capaian selama kurun waktu tahun 2014 – 2018. Kesenjangan tersebut dapat dijadikan input masalah yang harus segera ditangani dan sebagai agenda utama rencana pembangunan pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Berikut permasalahan pembangunan yang perlu diprioritaskan penanganannya sesuai dengan urusan yang ditangani oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka:

2.3.1. Urusan Wajib Perumahan

Permasalahan utama dalam Urusan Perumahan :

1. Rendahnya kualitas perumahan dari aspek sanitasi
2. Masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni
3. Masih banyaknya *backlog* penyediaan perumahan bagi masyarakat
4. Kurang lengkapnya penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam lingkungan perumahan

2.3.2. Urusan Wajib Kawasan Permukiman

Permasalahan utama dalam Urusan Kawasan Permukiman :

1. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak;
2. Belum optimalnya dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah;

2.3.3. Urusan Pertanahan

Permasalahan utama Bidang Pertanahan :

1. Banyaknya tanah yang belum bersertifikat
2. Belum maksimalnya penyelesaian sengketa tanah yang merupakan asset pemerintah daerah yang dikuasai oleh masyarakat dan pihak lain
3. Sulitnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus bersinergi dengan program yang ada pada OPD Provinsi, agar tidak terjadi overlap maupun ketidaksesuaian sasaran program. Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementrian dan Rencana Strategis OPD Provinsi dimaksudkan untuk mensinergikan sasaran yang akan dicapai oleh kementerian dengan sasaran OPD. Dalam telaahan tersebut akan diinventarisir permasalahan – permasalahan pelayanan OPD beserta faktor pendorong dan penghambatnya

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka berkoordinasi vertikal dengan kementrian yaitu Kementrian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tingkat Provinsi, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan BPN Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA AWAL RKPD

TABEL T-C.31					
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2024					
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA					
No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	Rencana pagu 2024 (AWAL)	SUMBER DANA		
			DAU	BANKEU	DAK
A.	BAGIAN SEKRETARIAT	6.716.749.538	6.716.749.538	-	-
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.984.900	14.984.900		
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.999.800	11.999.800		
3	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.984.900	5.984.900		
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.974.600	5.974.600		
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.974.600	5.974.600		
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.999.600	19.999.600		
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.999.900	14.999.900		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
8	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	4.957.115.282	4.957.115.282		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		
9	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.250.000	29.250.000		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		
10	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.535.000	40.535.000		
11	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.000.000	172.000.000		
12	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.732.500	105.732.500		
13	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.436.100	67.436.100		
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	142.508.000	142.508.000		
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.950.000	380.950.000		
	KegiatanPenyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.290.000	60.290.000		
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.279.356	219.279.356		
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.588.000	321.588.000		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.147.000	60.147.000		
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-		
21	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	80.000.000		
		-			
B.	BIDANG PERUMAHAN	1.615.456.000	1.615.456.000	-	-
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-			
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-			
22	Sub. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	-			
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			
23	Sub. Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			
24	Sub. Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			
25	Sub. Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-			
	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-			
26	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	-			
III	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-			
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-			
5	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.615.456.000	1.615.456.000		

C.	BIDANG PERMUKIMAN	26.287.929.000	9.272.320.000	-	17.015.609.000
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	-			
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten/Kota	-			
	Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	-		
25	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15.699.477.000	1.479.092.000		14.220.385.000
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-		
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		
	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	419.500.000	419.500.000		
26	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	2.795.224.000	-		2.795.224.000
VII	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-		
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-		
27	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	400.000.000	400.000.000	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-		
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-		
28	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	6.873.728.000	6.873.728.000	-	
VIII	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-		
	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-		
29	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	100.000.000	100.000.000		
D.	BIDANG PERTANAHAN	2.381.234.986	2.381.234.986	-	-
IX	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-			
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-			
30	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	152.700.400	152.700.400		
31	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	350.000.000	350.000.000		
X	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK	-			
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			
32	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.878.534.586	1.878.534.586		
		-			
	JUMLAH TOTAL	37.001.369.524	19.985.760.524	-	17.015.609.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan Perubahan Renja (RENJA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024, dilakukan pula telaah terhadap usulan Program dan Kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Program/Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 dengan kesepakatan hasil Musrenbang Tahun 2024.

Berdasarkan hasil Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Majalengka**

DPKPP Kabupaten Majalengka

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Keterangan : NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Bab ini berisi uraian tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024. Landasan dalam perumusan tujuan, sasaran Program dan Kegiatan terlebih dahulu dilakukan telaahan terhadap kebijakan Nasional terkait penyelenggaraan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mencakup keseluruhan aspek pelayanan. Telaahan ini merupakan upaya untuk memaduserasikan Program dan Kegiatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sehingga terwujud satu kesatuan capaian indikator.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka telah menetapkan target capaian kinerja yang dijadikan sebagai acuan dalam setiap tahunnya. Masing – masing tujuan dan sasaran dapat dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun berikut, dalam proses tersebut terdapat beberapa efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan yang telah diusulkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka, dengan adanya efisiensi yang tidak terdapat mengurangi target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan.

Telaahan kebijakan Nasional/BNPB terkait Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berguna untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, saling mendukung capaian kinerja antara Pemerintah Nasional dengan Pemerintah Provinsi. Sebagai acuannya digunakan kebijakan pembangunan Nasional khususnya yang terkait dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai mana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maupun yang dirumuskan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Fokusnya pada prioritas dan sasaran pada Tahun 2024, tentang Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Dalam Rencana Kerjanya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka telah menetapkan target capaian kinerja yang dijadikan sebagai acuan dalam setiap tahunnya. Masing – masing tujuan dan sasaran dapat dijabarkan dalam uraian berikut :

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman;

2. Sasaran

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2024-2026 sama dengan tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kegiatan adalah media untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk menilai tingkat capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang telah direncanakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka guna mencapai sasaran. Dengan adanya Program dan Kegiatan diharapkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diatasi sesuai dengan dukungan sumberdaya yang tersedia. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 beserta Prognosa dapat dilihat pada Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka.

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja DPKPP Tahun 2024 dirumuskan dengan

mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, Misi Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi, dan Lingkungan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan tatakelola Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pembangunan. Target Capaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2024, adalah meningkatkan tatakelola Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
- Pengentasan Kemiskinan,
- Penurunan prevalensi stunting
- Pencapaian Nilai SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir.

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain meliputi :

Pada tahun 2024 jumlah program sebanyak 10 (Sepuluh), Jumlah Kegiatan sebanyak 15 (Lima belas) dan Sub Kegiatan 32 (Tiga Puluh Dua) Sifat sebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan

1. Besifat mendesak (apabila terjadi bencana alam yang tidak terduga)
2. Berdasarkanajuan proposal dari masyarakat

Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan

Sumber dana DAU	Rp.	25.685.760.524
Sumber dana DAK	Rp.	17.015.609.000
Sumber dana BANKEU	Rp.	-
Total pagu	Rp.	42.701.369.524

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka, Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan organisasinya. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Hal ini dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023, keberhasilan pencapaian tujuan berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Pendanaan program, kegiatan dan sub. Kegiatan merupakan cara penyusunan pendanaan dan perumusan prioritas serta perhitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk pencapaian target tersebut alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Sebagaimana pada tabel 4 terlampir berikut ini:

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Majalengka
Tahun 2024

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Semula	Menjadi	RKPD 2024		APBD 2024			RKPD 2024 Perubahan					Nasional
1	03						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
1	03	03					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kebutuhan infrastruktur air minum yang terpenuhi		100,00	100,00	80,75	80,75	15.699.477.000	15.699.477.000	15.499.477.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	80,80	17.049.424.700	DPKPP
1	03	03	2	01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana air minum yang terbangun sesuai standar		100,00	100,00	80,75	80,75	15.699.477.000	15.699.477.000	15.499.477.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	80,80	17.049.424.700	DPKPP
1	03	03	2	01	0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah jaringan perpipaan yang terbangun		100,00	100,00	1.400 SR	1.400 SR	15.699.477.000	15.699.477.000	15.499.477.000	Kab. Majalengka	DAU dan DAK			Masyarakat	120 SR	17.049.424.700	DPKPP
1	03	05					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase permohonan pengolahan air limbah yang terlayani sesuai standar		200,00	200,00	70,17	70,17	3.214.724.000	3.214.724.000	3.413.324.000	Kab. Majalengka	DAU dan DAK			Masyarakat	70,22	3.754.656.400	DPKPP
1	03	05	2	01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana air limbah yang terbangun sesuai standar		200,00	200,00	70,17	70,17	3.214.724.000	3.214.724.000	3.413.324.000	Kab. Majalengka	DAU dan DAK			Masyarakat	70,22	3.754.656.400	DPKPP
1	03	05	2	01	0022		2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun		100,00	100,00	30 SR	45 SR	419.500.000	419.500.000	618.100.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	30 SR	679.910.000	DPKPP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	05	2	01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun		100,00	100,00	180 SR	180 SR	2.795.224.000	2.795.224.000	2.795.224.000	Kab. Majalengka	DAU dan DAK			Masyarakat	150 SR	3.074.746.400	DPKPP
1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan jaringan drainase		100,00	100,00	70,17	70,17	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	70,22	440.000.000	DPKPP
1	03	06	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase yang terbangun sesuai standar		100,00	100,00	70,17	70,17	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	70,22	440.000.000	DPKPP
1	03	06	2	01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang drainase yang terbangun		100,00	100,00	288,00	288,00	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	250 M	440.000.000	DPKPP
1	03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan jaringan jalan lingkungan		100,00	100,00	85,65	85,65	6.873.728.000	6.873.728.000	12.272.728.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	85,75	13.500.000.800	DPKPP
1	03	10	2	01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang terbangun sesuai standar		100,00	100,00	85,65	85,65	6.873.728.000	6.873.728.000	12.272.728.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	85,75	13.500.000.800	DPKPP
1	03	10	2	01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan lingkungan yang terbangun		100,00	100,00	14749	23499	6.873.728.000	6.873.728.000	12.272.728.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	700 M	13.500.000.800	DPKPP
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							-	-	140.000.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	100	154.000.000	DPKPP
1	04	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan		0	0	100	100	-	-	140.000.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	100,00	154.000.000	DPKPP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	02	2	03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana yang terbangun sesuai standar		0	0	100	100	-	-	140.000.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	100,00	154.000.000	DPKPP
1	04	02	2	03	0001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Persentase rumah korban bencana yang terbangun		0	0	100	100	-	-	140.000.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	100,00	154.000.000	DPKPP
1	04	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan kumuh yang tertata		100,00	100,00	33,33	33,33	1.615.456.000	1.615.456.000	1.747.820.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	33,33	1.922.602.000	DPKPP
1	04	04	2	01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kawasan kumuh yang terbangun		100,00	100,00	33,33	33,33	1.615.456.000	1.615.456.000	1.747.820.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	33,33	1.922.602.000	DPKPP
1	04	04	2	01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang terehab		100,00	100,00	200 Unit	200 Unit	1.615.456.000	1.615.456.000	1.747.820.000	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	200 Unit	1.922.602.000	DPKPP
1	04	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang dimanfaatkan		200,00	200,00	100,00	100,00	502.700.400	502.700.400	674.727.900	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	100,00	742.200.690	DPKPP
1	04	05	2	01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase kebutuhan PSU yang terpenuhi		200,00	200,00	100,00	100,00	502.700.400	502.700.400	674.727.900	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	100,00	742.200.690	DPKPP
1	04	05	2	01	0001	1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah rencana PSU		100,00	100,00	2 Dok	2 Dok	152.700.400	152.700.400	224.727.900	Kab. Majalengka	DAU			Masyarakat	2 Dok	247.200.690	DPKPP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04					Kelompok Program kegiatan dan Sub Kegiatan : PELAYANAN DASAR						6.716.749.538	6.716.749.538	6.820.690.538	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD		7.502.759.592	DPKPP	
1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai IKM Perangkat Daerah					6.716.749.538	6.716.749.538	6.820.690.538	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD		7.502.759.592	DPKPP	
1	04	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan		100,00	100,00	100,00	100,00	79.918.300	79.918.300	79.918.300	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	100,00	87.910.130	DPKPP
1	04	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun		100,00	100,00	2,00	2,00	14.984.900	14.984.900	14.984.900	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	2,00	16.483.390	DPKPP
1	04	01	2	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun		100,00	100,00	1,00	1,00	11.999.800	11.999.800	11.999.800	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	13.199.780	DPKPP
1	04	01	2	01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumenPerubahan RKA Perangkat Daerah yang disusun		100,00	100,00	1,00	1,00	5.984.900	5.984.900	5.984.900	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	6.583.390	DPKPP
1	04	01	2	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersusun		100,00	100,00	1,00	1,00	5.974.600	5.974.600	5.974.600	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	6.572.060	DPKPP
1	04	01	2	01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun		100,00	100,00	1,00	1,00	5.974.600	5.974.600	5.974.600	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	6.572.060	DPKPP
1	04	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LPPD yang tersusun		100,00	100,00	1,00	1,00	19.999.600	19.999.600	19.999.600	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	21.999.560	DPKPP

Kode							Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
												Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tesedianya Dokumen LAKIP Perangkat Daerah			100,00	100,00	1,00	1,00	14.999.900	14.999.900	14.999.900	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	16.499.890	DPKPP
1	04	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu			100,00	100,00	100,00	100,00	4.957.115.282	4.957.115.282	4.757.115.282	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	100,00	5.232.826.810	DPKPP
1	04	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan			100,00	100,00	36,00	36,00	4.957.115.282	4.957.115.282	4.757.115.282	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	36,00	5.232.826.810	DPKPP
1	04	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian Tepat Waktu			100,00	100,00	100,00	100,00	29.250.000	29.250.000	29.250.000	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	100,00	32.175.000	DPKPP
1	04	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan pakaian dinas perangkat daerahnya			100,00	100,00	1,00	1,00	29.250.000	29.250.000	29.250.000	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	32.175.000	DPKPP
1	04	1	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan penunjang operasional perangkat daerah			100,00	100,00	100,00	100,00	909.161.600	909.161.600	1.130.797.600	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	100,00	1.243.877.360	DPKPP
1	04	1	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit kerja yang terpenuhi komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100,00	100,00	1,00	1,00	40.535.000	40.535.000	40.535.000	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	44.588.500	DPKPP
1	04	1	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya			100,00	100,00	1,00	1,00	172.000.000	172.000.000	297.000.000	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	326.700.000	DPKPP
1	04	1	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi Bahan Logistik Kantornya			100,00	100,00	1,00	1,00	105.732.500	105.732.500	105.732.500	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	116.305.750	DPKPP

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	1	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	100,00	1,00	1,00	67.436.100	67.436.100	67.436.100	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	74.179.710	DPKPP
1	04	1	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100,00	100,00	1,00	1,00	142.508.000	142.508.000	142.508.000	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	156.758.800	DPKPP
1	04	1	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	100,00	2,00	2,00	380.950.000	380.950.000	477.586.000	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	2,00	525.344.600	DPKPP
1	04	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00	100,00	100,00	100,00	601.157.356	601.157.356	571.907.356	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	100,00	629.098.092	DPKPP
1	04	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase permohonan administrasi surat menyurat yang tertangani		100,00	100,00	100,00	100,00	60.290.000	60.290.000	60.290.000	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	100,00	66.319.000	DPKPP
1	04	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	100,00	100,00	100,00	219.279.356	219.279.356	190.029.356	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	100,00	209.032.292	DPKPP
1	04	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Unit Kerja Yang Terpenuhi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	100,00	1,00	1,00	321.588.000	321.588.000	321.588.000	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	1,00	353.746.800	DPKPP
1	04	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		100,00	100,00	100,00	100,00	140.147.000	140.147.000	251.702.000	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	100,00	276.872.200	DPKPP
1	04	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik		100,00	100,00	8,00	8,00	60.147.000	60.147.000	60.147.000	Kab. Majalengka	DAU			Pegawai di OPD	8,00	66.161.700	DPKPP

[illegible]

BAB V

P E N U T U P

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2024 disusun sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa masih banyak kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dan kami akan terus berupaya untuk mencari alternatif pemecahannya. Kendala atau permasalahan - permasalahan tersebut antara lain :

- Proses izin prinsip untuk pencairan Rutilahu Pasca Bencana memerlukan waktu yang cukup lama;
- Proses perizinan pemanfaatan lahan untuk kegiatan air bersih (jalur pipa, Mata Air, Reservoar) sering terkendala dengan masyarakat sekitar yang terkena dampaknya, sehingga menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan;
- Anggaran untuk pengadaan tanah belum tersedia, sehingga proses pengadaannya belum bisa dilaksanakan;
- Kekurangan jumlah personel untuk melaksanakan identifikasi dan inventarisasi aset PSU perumahan;
- Terbatasnya anggaran untuk pemeliharaan PSU yang sudah diserahkan kepada PEMDA.

Strategi pemecahan masalah yang harus dilakukan pada masa mendatang antara lain :

- Mengintensivkan komunikasi dan koordinasi dengan bagian penerbitan izin prinsip di SETDA;
- Melakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar yang terdampak maupun dengan masyarakat yang akan mendapatkan program tersebut;
- Perlunya koordinasi untuk meyakinkan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah, supaya anggaran dapat segera di realisasikan;
- Koordinasi dengan BKPSDM, melalui bagian urusan kepegawaian, agar masalah personel bisa dipenuhi;
- Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah supaya anggaran dapat ditambah, sehingga pemeliharaan Aset PSU dapat tertangani dengan baik.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkomitmen kuat untuk menjalankan semua program dan kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dan berusaha sekuat tenaga dengan sumber daya yang ada untuk mencapai semua target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Majalengka, 19 Agustus 2024

Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Majalengka



SIDHARTA, AP., MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19760923 199603 1 006